

## SOSIALISASI DAN PENDAFTARAN NIB PADA PELAKU UMKM DI KELURAHAN BRONDONG

Ananda Bayu Dewantara<sup>1</sup>, Muhammad Iskhaq<sup>2</sup>, Muhammad Nanda Ali  
Waket<sup>3</sup>, Slamet Asari<sup>4</sup>

Universitas Muhammadiyah Gresik

[bayuayanuei@gmail.com](mailto:bayuayanuei@gmail.com)

### ABSTRACT

MSMEs or micro, small and medium enterprises are an important part of the Indonesian economy. This industry is not affected by inflation and is not dependent on the global financial system. MSMEs are very important for the development of economic infrastructure for lower class communities. So far, they have run their businesses in an unorganized manner without utilizing their entrepreneurial skills effectively, especially without having a Business Identification Number (NIB) as proof of their legality. The socialization of the real work study program which aims to improve the formal legal elements of business for MSME actors in the Brondong District, Brondong District and Lamongan District was carried out on August 24 2023. Participants in the observation method received direction, socialization and direct practice in making Numbers. Parent Business (NIB). MSME players have built and have legal NIB businesses as a result of this community service. Convenience and legal certainty in doing business are two advantages of having an NIB for MSME participants as a means of boosting business development.

**Keywords:** Business Identification Number, Micro, Small and Medium Enterprises

### ABSTRAK

UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan bagian penting dalam perekonomian Indonesia. Industri ini tidak terpengaruh oleh inflasi dan tidak bergantung pada sistem keuangan global. UMKM sangat penting bagi pengembangan infrastruktur ekonomi masyarakat kelas bawah. Selama ini mereka menjalankan usahanya secara tidak terorganisir tanpa memanfaatkan keterampilan kewirausahaannya secara efektif, apalagi tanpa memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bukti legalitasnya. Sosialisasi program studi kerja nyata yang bertujuan untuk meningkatkan unsur hukum formal usaha bagi pelaku UMKM di wilayah Kecamatan Brondong, Kecamatan Brondong, dan Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2023. Peserta dalam metode observasi mendapatkan pengarahan, sosialisasi, dan praktek langsung dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Para pelaku UMKM telah membangun dan memiliki legalitas usaha NIB hasil dari pengabdian masyarakat ini. Kenyamanan dan kepastian hukum dalam berusaha menjadi dua keuntungan memiliki NIB bagi peserta UMKM sebagai salah satu sarana untuk mendongkrak perkembangan usaha.

**Kata Kunci:** Nomor Induk Berusaha, Usaha Mikro Kecil dan Menengah

## PENDAHULUAN

Pelaku Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) di Kelurahan Brondong cukup berkembang. Bidang usaha yang dijalani para pelaku UMKM di Kelurahan Brondong yang dimana para penduduk disana hampir semua bekerja sebagai nelayan. Usaha UMKM yang dijalani sebagian besar berhubungan dengan hasil laut. Keberadaan para pelaku UMKM di Kelurahan Brondong sangat membantu untuk mengembangkan hasil laut yang ada di Kelurahan Brondong. Pelaku usaha memerlukan izin usaha untuk menunjukkan bahwa usaha yang dilakukan tersebut memang ada dan layak untuk berdiri. Perizinan berfungsi untuk digunakan dalam membina, mengarahkan, mengawasi dan menertibkan kegiatan usaha. Perizinan dapat berfungsi sebagai pengatur dan juga penertib. Dengan adanya perizinan, para pelaku usaha diwajibkan untuk menjaga kualitas produk yang dihasilkan. Pelaku usaha tidak bisa sembarangan ketika membuat barang atau jasa, karena dalam perizinan sudah tercantum penanggungjawab usaha, sehingga ketika terjadi hal yang merugikan pihak lain maka pihak yang tercantum dalam legalitas tersebut yang harus bertanggungjawab (Sutedi, 2011).

NIB atau Nomor Induk Berusaha yang digunakan oleh pelaku usaha untuk memberi mereka kemampuan untuk melakukan bisnis yang sesuai dengan bidang usahanya. Nomor Induk Berusaha tersebut terdiri dari tiga belas angka, dengan tanda tangan elektronik dan pengaman di dalamnya. Nomor Induk Berusaha adalah dokumen yang berfungsi sebagai pengganti TDP (Tanda Daftar Perusahaan), dan API (Angka Pengenal Impor). Pelaku usaha melakukan pendaftaran dan nantinya akan diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota. Perizinan diberikan setelah pelaku usaha memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan. Surat izin usaha mempunyai manfaat yang banyak bagi pelaku UMKM yaitu untuk mempermudah pengajuan kredit, mempermudah memperoleh bantuan sosial dari pemerintah baik pemerintah pusat atau daerah dan menunjukkan bahwa usaha mereka sudah mendapatkan legalitas resmi dari pemerintah.

Namun, berdasarkan pengamatan yang dilakukan di lapangan, masih banyak UMKM pelaku barang dan komersial di Desa Santong yang tidak memiliki izin usaha seperti NIB (Nomor Induk Berusaha). Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah nomor yang diberikan oleh lembaga OSS setelah kemudian pelaku usaha atau UMKM mendaftar, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang pelaksanaan Perizinan Usaha Berbasis Risiko. Ketika survei dilakukan, ditemukan bahwa banyak pelaku usaha dan UMKM di Desa Brondong yang belum memiliki izin usaha NIB dan tidak menyadari keuntungan, fungsi, dan pentingnya memiliki izin tersebut bagi pelaku usaha dan UMKM yang memiliki perusahaan sendiri. Meskipun kelebihan NIB sendiri adalah mendapatkan izin usaha dan izin operasional atau komersial untuk menjalankan usahanya, namun juga memudahkan pelaku usaha atau UMKM untuk mendapatkan dokumen lain seperti NPWP Badan atau Perorangan jika pemohon tidak memiliki, Surat Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), NPWP Entitas atau Perorangan, dan sebagainya, Sehingga memudahkan pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha

seperti SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dan langsung mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Tentu, izin usaha NIB diwajibkan bagi seluruh pelaku usaha dan UMKM di Desa Santong demi menjamin kelangsungan penjualan sesuai dengan peraturan pemerintah (Latifah et al., 2023). Hal ini akan memungkinkan pelaku usaha dan UMKM untuk menjalankan operasionalnya tanpa kesulitan nantinya jika belum memiliki izin usaha, selain itu nantinya pelaku usaha dan UMKM dapat menjangkau pasar yang lebih luas dengan memiliki izin usaha NIB (Hartana, 2022).

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan sebuah implementasi mahasiswa dalam menjalankan pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat merupakan sarana bagi para mahasiswa untuk menyalurkan ilmu pengetahuannya yang diperoleh di bangku perkuliahan untuk membantu memajukan dan mensejahterakan masyarakat. Pengabdian pada masyarakat juga menjadi wadah untuk para mahasiswa memperluas jaringan dan relasi dalam hidup bermasyarakat. Salah satu program kerja yang diusulkan oleh Tim KKN Reguler UMG Kelompok 14 program studi Teknik Industri yakni dengan memberikan kegiatan Sosialisasi dan Pendaftaran NIB pada Pelaku UMKM di Kelurahan Brondong, dikarenakan melihat dari UMKM di Kelurahan Brondong yang masih kurang memahami akan NIB maka dari itu kami memberikan sosialisasi dan pendaftaran NIB, sosialisasi ini dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 yang berlokasi di Pendopo Kelurahan Brondong, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan.

## **METODE PELAKSANAAN**

Dengan mengumpulkan informasi keadaan atau potensi dusun tempat penempatan mahasiswa KKN, maka metode yang diterapkan adalah observasi (Nasution et al., 2020). Diusahakan data yang terkumpul dapat selengkap-lengkapnyanya. Upaya pengumpulan data bertujuan selengkap mungkin. Pengumpulan data dilakukan dengan berbagai cara, antara lain melalui kerja lapangan dan observasi langsung, wawancara dengan kepala desa, kepala sekolah setempat dan penelusuran dokumen/catatan di kantor kepala desa. Setelah pengumpulan, data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis sesuai dengan kebutuhan (Syaputra & Budiman, 2021). Untuk metode yang kami gunakan dalam pelaksanaan kegiatan program kerja Prodi PGSD ini menggunakan metode observasi yang meliputi beberapa tahapan diantaranya yaitu tahapan survey lokasi, tahapan observasi, tahapan pelaksanaan, tahapan penilaian, dan dokumentasi. Pertama kami melakukan survey lokasi, dengan mendatangi salah satu pelaku UMKM di Kelurahan Brondong dan melakukan wawancara terhadap pelaku UMKM tersebut. Kedua kami melakukan observasi untuk mengetahui seberapa tingkat pemahaman para pelaku UMKM terdapat NIB. Ketiga kami melakukan pelaksanaan dengan memberikan sosialisasi dan pendaftaran NIB pada pelaku UMKM di Kelurahan Brondong. Pelaksanaan dilakukan pada 24 Agustus 2023, bertempat di lokasi pendopo Kelurahan Brondong, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan. Pelaksanaan sosialisasi dan pendaftaran NIB ini menyasar 25 pelaku UMKM dan

pemilik warung makan. Sosialisasi dan pendaftaran NIB ini dipraktikkan dengan memberikan instruksi, paparan, dan praktik bagaimana menghasilkan NIB online menggunakan program OSS. Pelaku UMKM dipandu dengan menggunakan alat-alat dasar, khususnya telepon genggam mereka, dengan menyediakan informasi yang diperlukan dalam bentuk KTP, alamat email, dan nomor ponsel aktif, lokasi, dan fakta bisnis yang dikemas secara informatif dengan waktu penggunaan data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

(Pada tanggal 24 Agustus 2023 telah dilaksanakan program studi kerja nyata UMKM di Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, di lokasi Kecamatan Brondong. Tekniknya adalah dengan mengajarkan masyarakat cara membuat NIB online menggunakan aplikasi OSS dan memberikan mereka latihan untuk melakukannya. Pelaku UMKM dibimbing dengan alat yang sederhana, seperti ponsel pribadi, dengan memberikan informasi yang diperlukan berupa KTP dan lain-lain. Para pelaku UMKM di Kecamatan Brondong berkumpul di kantor kecamatan pada hari sosialisasi. Pelaku usaha diberikan materi sosialisasi dan orientasi, termasuk informasi mengenai legalitas berusaha dan khususnya keuntungan dan kepraktisan perizinan usaha mikro.

Di Kecamatan Brondong sudah lebih dari 5 tahun sejumlah UMKM beroperasi secara legal tanpa bantuan NIB Nomor Induk Berusaha. Karena berbagai alasan, banyak pemilik usaha pengolahan ikan laut yang lamban dalam mengurus izin. Rendahnya tingkat pendidikan, pemahaman mengenai perpajakan, kurangnya pemahaman para pelaku usaha, kegagalan para pemangku kepentingan dalam menyosialisasikan manfaat izin usaha, dan keasyikan begadang merupakan faktor-faktor yang menyebabkan pelaku usaha beroperasi di luar hukum.

Perizinan berusaha yang didasarkan pada tingkat risiko yang terkait dengan kegiatan usaha dikenal dengan perizinan berbasis risiko. Jenis izin usaha yang diperlukan tergantung pada seberapa besar risiko kegiatan usaha tersebut. Pemerintah memetakan tingkat risiko berdasarkan lapangan usaha atau klasifikasi standar KBLI bidang usaha Indonesia dengan menggunakan Sistem OSS Tunggal Online. Risiko rendah, risiko menengah rendah, risiko menengah tinggi, dan risiko tinggi adalah kategori risiko yang berbeda. Bisnis berisiko rendah hanya memerlukan NIB Nomor Induk Berusaha sebagai satu-satunya izin mereka. Lisensi tunggal menandakan bahwa Sertifikasi Jaminan Produk Halal SJPH, SNI Standar Nasional Indonesia, dan legalitas semuanya termasuk dalam NIB. NIB juga memuat Tanda Daftar Perusahaan TDP, Nomor Pengenal Impor API, dan informasi kepabeanan yang dapat diakses oleh importir dan eksportir. Selain sosialisasi pelatihan, dilakukan pula simulasi dan praktik dalam program kerja KKN pembuatan NIB Nomor Induk Berusaha bagi peserta UMKM. Pembuatan NIB dengan bantuan dan arahan dosen dan teman KKN dengan memanfaatkan perangkat smartphone masing-masing. Pemilik usaha berupaya membuat NIB satu per satu dengan membuka website [www.oss.go.id](http://www.oss.go.id) kemudian memasukkan informasi yang diperlukan sesuai dengan format pada halaman tersebut.

Pelaku UMKM mayoritas ditemukan kekurangan informasi penting seperti alamat email aktif, pendaftaran akun laman di OSS, data KTP kadaluwarsa yang tidak sesuai dengan informasi dari Dinas Dukcapil, dan kekurangan NPWP Wajib Pajak. Nomor identifikasi. Selain itu, pemilik bisnis masih kesulitan memahami cara menggunakan teknologi digital dan mengelola infrastruktur teknologi. Kesulitannya adalah datanya belum tersedia dan siap sehingga membutuhkan waktu lama untuk membuat NIB. Jika data terkait sudah lengkap, prosedur memakan waktu tidak lebih dari 10 menit. Hanya satu dari sembilan pelaku usaha yang mencapai kesuksesan.

## **KESIMPULAN**

Dari hasil program kerja kuliah kerja nyata KKN yang diselenggarakan Universitas Muhammadiyah Gresik pada tanggal 24 Agustus 2023 bagi pelaku UMKM di kelurahan Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, yaitu: Kehadiran dosen mendapat antusias oleh pelaku usaha dan dapat dirasakan manfaatnya, 9 pelaku usaha sudah mempunyai legalitas usaha berupa NIB, dengan memiliki legalitas usaha berupa NIB, para pemilik usaha sadar akan kebutuhan dokumen perijinan untuk kenyamanan, keamanan kepastian hukum, Penguatan SDM pelaku usaha dalam mengembangkan usaha.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Hartana. (2022). PENGEMBANGAN USAHA UMKM DI MASA PANDEMI MELALUI OPTIMALISASI DIGITAL MARKETING DI KABUPATEN BULELENG. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(8.5.2017), 2003-2005.
- Latifah, L., Nasrullah, D., Huda, F., Iswandi, G. U., Aditya, F., Firdiana, R. F., & Rismawati, R. (2023). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) Perseorangan Untuk Keberlanjutan Usahanya di Kelurahan Bulak, Kota Surabaya. *Jurnal Edukasi Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 9-25. <https://doi.org/10.35914/jepkm.v2i1.28>
- Sutedi, A. (2011). *Hukum Perizinan dan Sektor Pelayanan Publik*. Sina Grafika